

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JOM Fekon* 2(2)
- Anik, Irawati. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 10(1): 56-70
- Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Ngawi. (2018). *Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi*, 46, 217.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boby Arona. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Desentralisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bengkalis. *JOM Fekon*, Vol. 3(1).
- Cecilia. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Implementasi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah serta Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan. *Proceedings SNAB*.
- Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. (2018). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Eka. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Desentralisasidan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah. *JOM Fekon* 3(1)
- Ferida, A. (2018). Jenis industry high technology and low tech sebagai pemoderasi relevansi nilai informasi akuntansi biaya penelitian dan pengembangan. *STIE YKPN Yogyakarta*
- Hidayatullah, A. (2013). Pengaruh Pengendalian Akuntansi,Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Merauke. *Prosiding*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasir, Abdul. (2018). Penerapan good governance dan sistem pengendalian internguna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Politeknik Negeri Bandung*
- Paramitha. (2016). Pengaruh ketepatan sasaran anggaran, sistem pengendalian manajerial sekor publik dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja. *E-Journal Akuntansi Udayana*

- Perwirasari, Fajar. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Universitas Negeri Semarang*.
- Putri, Rizka Aulia. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa 4 (1): 20–34*.
- Reyhan Hady Fauzan. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *JOM Fekon, 4(1), 1122-1136*.
- Rio Pratama, Henri Agustin, Salma Taqwa. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429-444*.
- Rizky Darmawan. (2016). Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Skpd Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon, 3(1), 792-806*.
- Rokhlinasari, Sri. (2016). Teori teori dalam pengungkapan informasi. *IAIN Syekh Nurjati*.
- Setyawan, Hari. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa 4 (1)*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Ferida. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Yogi Isnanto. (2019). Pengaruh pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sukoharjo. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Badan Akuntabilitas Laporan Keuangan Negara. (2018). *Sebanyak 133 desa terlampat dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban*. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN13b8bff84bbea9634849ae1b25d29452a6.pdf>. Diakses tanggal (19/04/2020)
- Impres No 7. (1999). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 8. (2006). Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 58. (2005). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/906.bpkp>

Peraturan Pemerintah RI No 45. (1992). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II

Undang-undang No 32.(2004). Pemerintah Daerah.

Undang-undang No 9. (2015). Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah)